Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat | SENAMA
Website: https://ejournal.unsera.ac.id/index.php/senama
E-ISSN : 3063-4849
UNIVERSITAS SERANG RAYA, 3 Juli 2024

Relasi Kuasa Dalam Fenomena Bullying di Sekolah

Oleh: Usep Saepul Ahyar
(Administrasi Publik, Fisipkum, Universitas Serang Raya)

usepahyar@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya bullying atau perundungan di sekolah merupakan sebuah ironi yang memprihatinkan. Sekolah sepertinya masih belum terbebas dari praktek-praktek kekerasan yang melibatkan relasi kuasa antara pihak yang dominan dengan pihak yang dianggap sebagai sub ordinat. Masih terdapat budaya *patriarkhi* yang memandang pihak perempuan sebagai kelompok lemah di satu pihak di hadapan laki-laki sebagai yang memiliki keunggulan di pihak lain. Demikian juga masih terdapat budaya *feudal* yang memandang kelompok yang memiliki status sosial tertentu dianggap lebih hebat dan berhak atas *privilege* dan *prestige* atas kelompok lain. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan diharapkan berfungsi emansipatoris, membebaskan dari berbagai praktek relasi sosial yang tidak adil, termasuk bullying tersebut, sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman, aman dan bermakna bagi kehidupan dan tumbuh kembang anak-anak generasi bangsa. Tulisan ini akan melihat akar masalah sosial dari praktek-praktek perundungan di sekolah dihadapkan dengan konsep Pendidikan/kurikulum yang "menekan". Metode tulisan ini dilakukan dengan penelusuran berbagai literatur, seminar tentang bullying dan melakukan wawancara mendalam *(indepth interview)* bersama guru-guru dan siswa-siswi SMPN 3 Kramatwatu, tempat KKM Unsera kelompok 35 tahun 2024 melaksanakan tugasnya. Temuan cukup menarik bahwa praktek *bullying* merupakan gambaran praktek dari struktur sosial di masyarakat yang tidak adil, seperti patriakhi dan feudalism sebagai gambaran praktek relasi-kuasa yang amat kental dan belum sepenuhnya terbebas dari Lembaga Pendidikan kita. Beberapa rekomendasi muncul agar dapat mengurangi atau mengantisipasi perilaku bullying, yakni memperkuat Lembaga BK (Bimbingan Konseling) di sekolah dan menghadirkan kurikulum yang membebaskan dari belenggu ideologis yang tidak adil selama ini.

Kata kunci: Bullying, relasi kuasa, Pendidikan, emansipatoris

ABSTRACT

The rise of bullying in schools is a concerning irony. Schools seem to be still not free from violent practices that involve power relations between dominant groups and those who are considered sub ordinate. There is still a patriarchal culture that views women as a weak group on the one hand in front of men as having superiority on the other. Likewise, there is still a feudal culture that views groups that have a certain social status as greater and entitled to privilege and prestige over other groups. Schools as educational institutions are expected to function emancipatorically, freeing from various unfair social relations practices, including bullying, so that schools become comfortable, safe and meaningful places for the life and growth of the nation generation of children. This paper will look at the social roots of bullying practices in schools faced with the concept of "suppressive" education/curriculum. The method of this paper is done by searching various literatures, seminars on bullying and conducting in-depth interviews with teachers and students of SMPN 3 Kramatwatu, where KKM Unsera (University of Serang Raya) 35th class of 2024 carried out its duties. The findings are quite interesting that the practice of bullying is a picture of the practice of social structures in society that are unfair, such as patriarchy and feodalism as a picture of the practice of power relations that are very thick and have not been completely freed from our educational institutions. Several recommendations emerge in order to reduce or anticipate bullying behavior, namely strengthening the BK (Guidance Counseling) Institute in schools and presenting a curriculum that frees from the ideological shackles that have been unfair so far.

Keywords: Bullying, power relations, education, emancipatory

1. PENDAHULUAN

Normalnya, dunia Pendidikan harus terbebas dari segala bentuk kekerasan dan *bullying* atau perundungan, karena sejatinya dunia Pendidikan, dalam hal ini sekolahan adalah sarana untuk membebaskan manusia dari struktur sosial yang tidak adil. Paulo Freire (2007), seorang filsuf pendidikan terkenal dari Brazil, memberikan kritik tajam terhadap dunia Pendidikan yang masih melanggengkan struktur mapan dan masih menciptakan penindasan, kondisi ini bertolak belakang dengan esensi pendidikan yang seharusnya memiliki fungsi membebaskan (emansipasi) dari berbagai penindasan dan struktur sosial yang tidak adil. Pendidikan jangan justru menjadi bagian dari potret buram ketidakadilan tersebut. Bagi Freire (2007), pendidikan berpotensi membebaskan, mencerdaskan, dan pendidikan yang membebaskan merupakan jalan terang menuju pengetahuan dan pemikiran kritis yang memang diperlukan.

Namun, kenyataan berbicara lain, dunia Pendidikan di Indonesia khususnya, belum sepenuhnya terbebas dari masalah penindasan, kekerasan, *bullying* yang menjadi gambaran buruk situasi struktur masyarakat secara umum. Hal ini, paling tidak, terlihat dari hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022,[1] yang menunjukan bahwa sebanyak 34,51 persen peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual, lalu 26,9 persen peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan (*bullying)*. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam Catatan Akhir Tahun Pendidikan, tahun 2023, menyatakan bahwa kasus *Bullying* di sekolah menunjukan peningkatan[2] dari 21 kasus di tahun 2022, menjadi 30 kasus di tahun 2023 dan hanya sedikit yang mau berani melapor. Kasus *bullying* menyebar di semua jenjang Pendidikan, antara lain; 50% terjadi di jenjang SMP/sederaja, 30% terjadi di jenjang SD/sederajat, 10% di jenjang SMA/sederajat dan 10% di jenjang SMK/sederajat[3].

Temuan lain didapatkan dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SNPHAR, KPPPA) tahun 2021 yakni 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat data pengaduan masyarakat tertinggi sepanjang 2022 adalah anak korban kejahatan seksual (anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber), sebanyak 2.133.

Data di atas menunjukan bahwa telah terjadi "darurat" *bullying* dan kekerasan anak usia Pendidikan yang memerlukan penangan serius dari berbagai lapisan masyarakat. Penangan juga harus konprehenship yang menyasar akar persoalan dari perilaku *bullying* tersebut. Selama ini penangan masih bersifat *simptomatik*, reaktif pada gejala-gejala kecil, belum menyasar pada fenomena sesungguhnya. Salah satu yang seringkali abai adalah melihat/mengurai adanya relasi kuasa dalam stratifikasi sosial di Indonesia yang dilanggengkan dalam dunia Pendidikan, sehingga budaya-budaya hierarkhis-feudal yang berpotensi memicu untuk menampakan kuasa di sekolah berupa *bullying*.

2. METODE PELAKSANAAN

Tulisan ini dikonstribusikan oleh berbagai metode, antara lain: *pertama,* penelusuran berbagai literatur tentang bullying sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bullying yang membedakan dengan jenis kekerasan lainnya. Kejelasan pengertian yang

[1] Sumber diunduh (24/06/2024): Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:368/sipers/A6/VIII/2023

[2] https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7117942/catatan-akhir-tahun-pendidikan-2023-fsgi-kasus-bullying-meningkat

[3] https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7117942/catatan-akhir-tahun-pendidikan-2023-fsgi-kasus-bullying-meningkat

dimaksud agar menjadi focus pada masalah yang sedang dihadapi. Penelusuran Pustaka juga terhadap konsep relasi-kuasa dari Michel Foucault, seorang filsuf Perancis yang melihat relasi kuasa disasarkan pada pengetahuan yang didisiplinkan.

Kedua, melakukan seminar tentang *bullying* atau perundungan yang dilanjutkan dengan diskusi bersama siswa-siswi SMP 2 Kramatwatu, Serang, Banen, sehingga didapatkan semacam aspirasi dan persoalan *bullying* yang selama ini terjadi berbasis pada pengalaman yang mereka rasakan sehari-hari. *Ketiga,* data juga didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam *(indepth interview)* bersama guru-guru yang kemudian didapatkan berbagai persoalan dan juga Langkah tindak lanjut dan rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan, khususnya di sekolah tersebut dan sekolah lain pada umumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bahasa Indonesia, *Bullying* dikenal dengan istilah perundungan yang diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2010) sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan terus-menerus. Goodwin (2010) mengemukakan bahwa perilaku *Bullying* merupakan sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya. Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Olweus (1999) yang mendefinisikan *bullying* sebagai masalah psiko-sosial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban *bullying* dimana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban.

Menurut Prasetyo (2011) Dominasi kekuatan oleh pelaku terhadap korban, merupakan di antara faktor penting yang sering menyebabkan terjadinya *bullying*. Kekuatan lebih daripada korban dimaknai sebagai ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban, baik kelebihan/ kekurangan fisik, ukuran badan, kepandaian bicara, perbedaan gender/jenis kelamin, status sosial, perasaan lebih superior, perbedaan jumlah dan ketidakseimbangan kekuatan lainnya.

Penyalahgunaan ketidakseimbangan itu dilakukan secara terus-menerus dengan cara mengganggu, menyerang secara berulang kali, atau dengan cara mengucilkan korban dari kelompoknya. Dari beberapa pengertian itu, tersirat bahwa dalam Tindakan perundungan terdapat relasi kuasa antara pihak yang dominan dengan pihak yang dianggap sub ordinat.

Adanya ketidakseimbangan kekuatan *(imbalance power)* itu yang justeru membedakan antara *bullying* dengan kekerasan atau perilaku kekerasan pada umumnya. Dengan kata lain, dalam *bullying*, korban tidak dapat membalas pelaku *bullying*, walaupun Ia merasa tersakiti, yang disebabkan karena faktor ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak. Hal lain yang membedakan *bullying* dengan kekerasan lain adalah intensitas waktu, dimana *bullying* dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus. hal ini juga dikarenakan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, sementara pelaku ingin menunjukan superioritas/ kepentingan, baik kepentingan ekonomi atau dorongan untuk mendapatkan kepuasan atas kemampuan dominasinya terhadap orang lain (Rigby, 2003).

Relasi-kuasa Foucault sebagai perspektif

Relasi kekuasaan adalah salah satu pola hubungan yang terbentuk dari berbagai pola relasi antar-manusia yang membawa suatu kepentingan di dalam kekuasaan tertentu. Terdapat sejumlah teori relasi kuasa menurut para ahli, mulai dari John Locke hingga Paul-Michel Foucault. Nama terakhir disebut adalah seorang filsuf, ahli teori sosial, serta kritikus sastra asal Prancis kelahiran 15 Oktober 1926. Perspektif relasi kekuasaan Foucault tersebut yang akan menjadi sudut pandang tulisan ini untuk melihat fenomena *bullying* di sekolah selama ini.

Perspektif Foucault (1990) menjadi menarik, karena melihat kekuasaan tidak sekedar persoalan kepemilikan kuasa, siapa menindas kelompok mana, bukan dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* dan pihak lainnya *powerless*. Bagi Foucault, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang *imanen,* tertanam dalam ruang subjektivitas dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan itu menyebar, ada di mana-mana *(omnipresent)*, bahkan di setiap pola relasi sosial.

Dalam bukunya The History of Sexuality Vol. I, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni (1990:94-95):

1. Kekuasaan itu menyebar, dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang dinamis.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Dalam kekuasaan tidak ada lagi distingsi *binary opositions*, karena kekuasaan mencakup keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi *(resistance)*.

Dalam hal *bullying* di sekolah, relasi kuasa dilihat berada pada semua pola relasi, termasuk individu siswa dengan individu yang lain, bukan hanya melihat relasi kuasa antara intitusi atau kelompok satu dengan institusi atau kelompok lain, misalnya kelompok guru yang disinyalir memiliki kuasa dan pihak siswa yang sub ordinat atau *powerless*. Relasi kuasa Foucault dimungkinkan terjadi di semua relasi, individu guru dengan individu guru lain atau siswa satu dengan siswa lain secara individual.

Relasi kuasa dan pengetahun dalam Bullying di sekolah

Bullying, Bagi Foucault, merupakan pola relasi yang didorong oleh pengetahuan pelaku yang telah mapan, baik didapatkan dari sekolah yang tidak menerapkan kurikulum pembebasan atau dari lingkungan social keluarga dan lingkungan sekitarnya, dimana mereka berasal. Semua Pola relasi kuasa ini dilegitimasi atau dinormalisasi, dan didisiplinkan oleh pengetahuan. Bagi Foucault, pengetahuan subjek (pelaku dan korban) akan menentukan corak setiap pola relasi yang terjadi. Dalam konteks *bullying* terjadi karena subjek *bullying* memiliki pengatahuan yang imanen bahwa individu tersebut adalah superior, dan di luar dirinya adalah sub ordinat. Begitu juga korban *bullying*, Ia merasa/mengetahui bahwa dirinya lemah.

Siswi perempuan mengalami bullying oleh individu siswa laki-laki yang disosialisakan berbagai ajaran/ pengetahuan yang menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibanding dengan jenis kelamin perempuan, walaupun tentu kenyataannya tidak selalu demikian. Pengetahuan tentang posisi laki-laki dan perempuan yang *patriakhis* (menempatkan laki-laki lebih unggul) terus disosialisakan melalui pengetahuan dan pola relasi sehari-hari, sehingga pengetahuan tersebut tidak pernah berubah semenjak dari lingkungan keluarga hingga sekolah. Sekolah dalam hal ini alih-alih mengubah struktur pengetahuan tersebut, malah berkonstribusi melanggengkannya dalam pengajaran atau praktek kegiatan di sekolah sehari-hari.

Dengan demikian seharusnya pihak sekolah melakukan transformasi ke arah pengetahuan yang adil dan membebaskan. Kesadaran penyelenggara harus ditingkatkan bahwa pengetahuan itu tidak terlepas dari ideologi dominan. Alih-alih mentransformasi pengetahuan menjadi lebih adil, Lembaga Pendidikan lebih banyak yang melanggengkannya. Di Lembaga Pendidikan corak pegetahuan *patriarkhis* masih berkembang dan masih menjadi mainstream. Maka tidak heran, dalam konteks *bullying,* siswi perempuan lebih sering menjadi korbannya. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SNPHAR, KPPPA) tahun 2021 yakni 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan usia 13 sampai dengan 17

tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir.[4]

Jadi betapa pengetahuan sesorang akan memberikan corak pola relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga individu siswa yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan finansial, dimana si kaya akan bisa mengatur si miskin. Demikianlah *bullying* di sekolah terjadi, di mana siswa yang lebih kaya akan melakukan *bullying* jika memiliki pengetahuan dan kesadaran imanen bahwa kepemilikan/kekayaan atas uang bisa menjadi berkuasa dan memerintah siapa pun yang miskin.

Kondisi ini tergambar dalam wawancara dengan para guru yang mencatat bahwa korban perempuan lebih banyak dari laki-laki. Begitu juga siswa-siswi yang "miskin" atau lemah dalam beberapa hal, misalnya lemah secara fisik, kemamuan berbicara dan kemampuan lain seringkali menjadi korban *bullying*.

Dari seminar, banyak keluhan siswa-siswi yang mengalami secara "tidak langsung" misalnya bercandaan fisik, mengolok orang tua dengan menertawakan nama orang tua korban yang dirasa menurut mereka "kampungan". Dalam sudut pandang Foucault, fenomena ini tidak terlepas dari sosialisasi lingkungan, termasuk lingkungan Pendidikan yang belum membebaskan kesadaran siswa-siswi akan persamaan *(equality)* manusia, sehingga dipastikan keadaran yang dimiliki adalah kesadaran yang mengafirmasi situasi stratifikasi sosial yang memang tidak adil. Modus bercandaan adalah awal *bullying* berlaku, karena itulah yang membedakan antara *bullying* dan jenis kekerasan lain dilakukan berulang-ulang, bahkan kadang pelaku dan korban tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan *bullying*. Maka tidak heran korban pun kebanyakan diam, tidak melaporkannya kepada institusi yang memiliki otoritas dalam bidang ini.

Fenomena *bullying* di sekolah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, jika menginginkan lahirnya generasi bangsa yang sehat secara jasmani dan rohani. Dampak perilaku agresif *Bullying* menurut studi Rahmawati (2016) tidak bisa dianggap remeh, karena akan membekas pada psikologis siswa, baik pada pelaku ataupun korban. Dampak bagi pelaku dan korban akan dirasakan baik jangka pendek ataupun jangka Panjang; korban akan merasa cemas, tidak aman, tidak nyaman untuk pergi ke sekolah, karena merasa dikucilkan dan harga diri rendah. Secara umum akan mengalami gangguan emosional dan kepribadian yang dampaknya bisa melakukan hal-hal yang ekstrim, seperti bunuh diri. Bullying juga akan berdampak buruk pada kepribadian pelaku; toleransi rendah, mudah memberi label buruk pada orang lain dan kehilangan rasa empati dan berakibat pada mudahnya merampas hak-hak orang lain.

4. KESIMPULAN

Dari penelusuran literatur, Diskusi mendalam dan Seminar anti *bullying* yang diadakan dalam rangka memperdalam persoalan bullying yang marak terjadi di Lembaga Pendidikan belakangan ini, diharapkan dapat memahami akar pesoalan dan sekaligus memberikan rekomendasi agar *bullying* di sekolah dapat diminimalisasi. Dalam studi ini memakai sudut pandang relasi kuasa dari Michel Foucault untuk menggali akar permasalahan mengapa *bullying* di sekolah terjadi bahkan marak belakangan ini.

Temuan cukup menarik bahwa praktek *bullying* merupakan salah satu pola relasi kuasa yang didasarkan pada kesadaran imanen setiap pelaku dengan dasar pengetahuan yang mereka miliki. Pengetahuan bisa didapatkan dari proses sekolah ataupun lingkungan mereka berasal. Pengetahuan yang ditranformasi di sekolah tidak lepas dari ideologi mainstream masyarakat secara umum, di mana ideologi *patriarkhi,* feodalisme masih cukup mendominasi. Sehingga pengetahuan yang mereka internalisasi

[4] Sumber diunduh (24/06/2024): Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:368/sipers/A6/VIII/2023

merupakan gambaran pengetahuan dari praktek-praktek masyarakat yang tidak adil. Lembaga Pendidikan seharusnya mentransformasi persoalan pengetahuan tersebut ke arah relasi kuasa yang lebih egalitarian. Lembaga Pendidikan, sekolahan dalam hal ini seharusnya menjalankan tugas emansipatoris, membebaskan dari belenggu-belenggu pengetahuan yang merefleksikan kepentingan kelompok dominan.

Beberapa rekomendasi muncul agar dapat mengurangi atau mengantisipasi perilaku *bullying*, yakni meninjau kembali secara kritis kepentingan pengetahuan yang selama ini masih mengandung ajaran *patriarkhis* dan feodalisme, dan berupaya mempraktekkan kegiatan kesiswaan yang egaliter dan humanis. Selain itu memperkuat kelembagaan BK (Bimbingan Konseling) di sekolah dengan menjadikan BK yang edukatif dan menghadirkan kurikulum yang membebaskan dari belenggu ideologis yang tidak adil selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Persekolahan Hingga Smu*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Freire, Paulo.(2007). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: REaD bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

----------. (2007). *Pedagogi Hati*. Yogyakarta: Kanisius.

----------. (2008). *Pendidikan kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.

Foucault, Michel. (2003). *Society must be Defended*. UK: Penguin Books.

----------. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York: Vintage Books.

Goodwin, D. (2010). *Strategis To Deal With Bullying (Strategi Mengatasi Bullying)*. Alih Bahasa: Cicilia Evi Graddiplsc., M.Psi. Wellington Australia: Kodsrearch Inc.

Olweus, D. (1999). *The nature of school bullying: A cross-national perspective*. London & New York: Routledge.

Rigby. K. (2003). *Stop the bullying: a handbook for schools*. Acerpress.

Schott, R. M., & Søndergaard, D. M. (Eds.). (2014). *School bullying: New theories in context*. Cambridge University Press.

Jurnal, Buletin

Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. (2011). *Bullying di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak*. Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi. Vol. 4, No. 1.

Rahmawati, Sri W. (2016). *Salah Kaprah Bullying, Buletin KPIN*. https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/45-salah-kaprah-istilah-bullying (diunduh 26/06/2024).

Website, Berita Online

Kementrian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:368/sipers/A6/VIII/2023 . diunduh (24/06/2024). https://ditpsd.kemdikbud.go.id.

https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7117942/catatan-akhir-tahun-pendidikan-2023-fsgi-kasus-bullying-meningkat.

https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7117942/catatan-akhir-tahun-pendidikan-2023-fsgi-kasus-bullying-meningkat